

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam GBHN 1985 telah digariskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap itu masing-masing bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya (Hadi dan Lincoln, 1987)

Indonesia masih merupakan negara agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja di sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1989)

Kenyataan yang ada, pada setiap tahapan pembangunan tersebut pembangunan ekonomi pertanian merupakan bagian yang diprioritaskan. Kesadaran ini tidak lain karena Indonesia adalah negara agraris yang harus melihat pertanian sebagai potensi dominan. Sebagian angkatan kerja diserap di sektor pertanian, yaitu sebanyak 56,6% dari seluruh angkatan kerja (Fadholi, 1991)

Kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia senantiasa didasarkan pada amanat yang telah digariskan dalam GBHN. Dalam pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat pertanian secara lebih merata. Untuk mencapai tujuan pertanian tersebut dapat dilakukan

dengan cara meningkatkan produksi, produktivitas tenaga kerja, tanah, dan modal (Soekartawi, 1993)

Dalam menjalankan usaha taninya setiap petani memegang peranan penting antara lain menjadi seorang juru tani yang memelihara tanaman guna mendapatkan hasil yang berfaedah, menjadi pengolah dan mengambil keputusan dalam penetapan alternatif-alternatif yang ada (Mosher. Al, 1987)

Di bidang pembangunan pertanian usaha yang digarap serius sejak awal Pelita I adalah sektor padi sawah untuk mengejar program swasembada beras sehingga harga beras dapat terjangkau rakyat banyak.

Dan aneka ragam program Bimas, kredit murah secara terus-menerus ditawarkan secara luas oleh pemerintah disertai bibit unggul dan sarana input modern. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertanian pangan peningkatan produksi terjadi terutama karena hasil perhektar, bukan karena perluasan lahan (Mubyarto, 1985)

Usaha untuk meningkatkan produksi/produktivitas bukanlah usaha yang mudah, karena menyangkut pola aspek ekonomi (faktor produksi) dan menyangkut pola aspek sosial, politik, budaya, dan lain-lain (Gultom, 1990).

Pada hakekatnya tingkat kemakmuran suatu masyarakat tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Unsur-unsur kebutuhan utama tersebut bagi kebanyakan penduduk terutama yang tinggal di pedesaan masih kurang terpenuhi (Djohadi Kusumo, 1975)

Dalam suatu masyarakat, pola konsumsi dipengaruhi beberapa faktor, terutama tingkat pendapatan. Akan tetapi faktor-faktor lain seperti jumlah anggota keluarga, asal usul, adat istiadat, harga barang, dan jasa turut mempengaruhi pola konsumsi (Boediono dan